EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN TRANSPARANSI DANA DESA DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN TOLANGOHULA KABUPATEN GORONTALO

Felmi D. Lantowa¹, Nurjanah Sidikin²

1. 2., Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Email; felmi89.lantowa@gmail.com, nurjanahsadikin@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 22 November 2021, Disetujui: 24 Desember 2021, Publish 24 Desember 2021

Abstract:

This study aims to determine the Effectiveness of Village Fund Management and Transparency in Sidoharjo Village, Tolangohula District, Gorontalo Regency. This type of research uses descriptive research with a qualitative approach according to Arif (2015:21). The results of this study are that the Management and Transparency of Village Funds in Tolangohula District, Gorontalo Regency are in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 where the planning, implementation, administration, reporting and accountability of Village Funds are in accordance with the provisions of Village Fund management as regulated in Permendagri No. 20 of 2018, but in terms of planning, Sidoharjo Village still does not routinely involve the community in the village fund planning deliberation process as a form of supervision of the Village Government, in terms of implementation there are often changes to the budget made and in terms of transparency the management of Village Funds has been implemented. implemented by the Sidoharjo Village Government but there is still a need for government evaluation of the community regarding the delivery of Village Fund Management to the community properly and clearly in order to create transparent and accountable financial reports, this is as the theory expressed by Krina (2015:17).

Keywords: *Management Effectiveness, Transparency, Village Funds*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dan Transparansi Dana Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Arif (2015:21). Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa di Desa Sidoharjo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa sudah sesuai dengan ketentuan pengelolaan Dana Desa yang diatur dalam permendagri No. 20 Tahun 2018, namun dari segi perencanaan Pemerintah Desa Sidoharjo sudah melibatkan masyarakat tetapi partisipasi masyarakat masih kurang dalam proses musyawarah perencanaan Dana Desa sebagai bentuk pengawasan terhadap Pemerintah Desa, dari segi pelaksanaan sering terjadi perubahan anggaran dan dari segi transparansi pengelolaan Dana Desa sudah di implementasikan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo tetapi masih perlu adanya evaluasi pemerintah terhadap masyarakat mengenai penyampaian Pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat dengan baik dan jelas agar terciptanya laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel hal ini sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Krina (2015:17).

Kata kunci : Efektivitas Pengelolaan, Transparansi, Dana Desa

PENDAHULUAN

Indonesia dalam segi pemerintahan terus mengupayakan dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan daerah, desa dan juga kota sama-sama seimbang. Namun dalam pelaksanaannya masih di hadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Ketimpangan tersebut terjadi dikarenakan faktor yang mempengaruhi sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Menghadapi permasalahan tersebut strategi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa diberikan wewenang dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang di miliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Cholisin, 2012:11).

Dana Desa adalah Dana APBN yang di peruntukkan bagi Desa yang di salurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tujuan dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, untuk menuntaskan

kemiskinan, untuk memajukan perekonomian Desa, dan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa dan untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. (Irawan 2015:7).

Dalam pelaksanaan pemerintahan Desa tersebut di tuntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik. Dimana salah satu karakteristik atau unsur utama Good Governance adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban serta adanya transparansi. Maka demikian akuntabilitas dan transparansi sangat di perlukan dalam menunjang penerapan otonomi Desa agar berjalan dengan baik. (Aprisiami, 2012:20).

Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu Desa yang mendapatkan bantuan dana Desa dari Pemerintahan.

Dana Desa ini diberikan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang berada pada daerah/desa tersebut. Namun Dana Desa (DDS) yang digunakan dalam pemberdayaan dan pembangunan desa masih kurang maksimal hal ini bisa dilihat dari realisasi penggunaan anggaran dana desa di desa Sidoharjo masih belum terealisasi sepenuhnya khususnya untuk jumlah yang besar belum teralisasi pada bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2018 yang jumlah realisasi anggarannya masih sekitar Rp. 13.847.500 yang belum teralisasi. Dan pada tahun 2019

jumlah yang besar yang belum terealisasi terdapat pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang jumlahnya masih sekitar Rp. 31.826.000 yang masih belum terealisasi pada laporan Realisasi Anggaran APBDes di Desa Sidoharjo. Tetapi pada Tahun 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sudah cukup maksimal dalam penggunaan anggarannya, namun Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa jumlah yang belum teralisasi masih cukup besar yaitu sekitar Rp. 69.003.625 pada Desa Sidoharjo. Dan pada Tahun 2018-2019 pada Bidang Pemberdayaan Desa mengalami penurunan nilai.

Hal tersebut mengakibatkan permasalahan pada keuangan desa yang serius yang menyebabkan kurang optimalnya penerapan anggaran. Yang sebenarnya penggunaan DDS adalah sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Bidang Pembangunan Desa dan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tlmgal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa .Hal ini dikarenakan kurangnya perencanaan yang di pergunakan untuk peningkatan usaha masyarakat yang berada pada Desa Sidoharjo sehingga usaha-usaha warga Desa Sidoharjo masih kurang

berkembang dan mengakibatkan penjualan pada usaha di Desa masih dikatakan minim/sedikit. Selain itu Pengelolaan Dana Desa tersebut masih kurang optimal sesuai dengan tujuan dari Dana Desa yang ada. Seperti dalam program pembangunan masalah teknis atau kendala mengikat yang sering terjadi misalnya masalah pembebasan tanah bukanlah ketersediaan lahan, melainkan bagaimana mencapai kesepakatan tentang harga yang pantas. Berikut tentang ketidakefisiensi dalam pelaksanaan pembangunan, dimana efektif merupakan suatu hal yang dapat mencapai hasil akhir sesuai dengan waktu yang di inginkan atau di tetapkan sebelumnya.

Pada tahapan pelaksanaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, di buktikan dengan tidak memanfaatkan papan informasi sehingga masyarakat kesulitan untuk melihat jadwal pelaksanaan kegiatan namun telah menerapkan prinsip akuntabilitas, dibuktikan dengan semua kegiatan di cantumkan dalam pelaporan, tahap pertanggungjawaban secara teknis bisa di katakana sudah baik, sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku, namun masih rendahnya SDM dalam tingkat memahami Pengelolaan Administrasi Keuangan sehingga sering mengalami kesalahpahaman antara unit kerja yang mengakibatkan keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban. Padahal masyarakat harus mengetahui dan ikut serta

mengawasi pengelolaan keuangan Desa. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui anggaran pendapatan yang di terima oleh Desa. Kurang pahamnya masyarakat dengan pengelolaan Dana Desa berakibat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan terjadinya kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah akibat krisis kepercayaan.

Berdasarkan pernyataan latar belakang di atas maka peneliti ini meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang Efektifitas Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Arif (2015:21) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bukan berasal dari berupa angka ataupun hitungan lainnya.

Berkaitan dengan pengumpulan data penelitian, ada tiga proses yang akan dilakukan oleh penelitian, sebagai berikut: 1) Observasi yaitu mengamati hal-hal yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian ini. 2) Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data melalui pencatatan dan berbagai dokumen yang mendukung penelitian atau bukti-bukti yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas pada penelitian ini. 3) Wawancara, yang di lakukan dalam penelitian ini dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan

informan yang di pilih berdasarkan kaitan dalam penelitian ini dalam kegiatan wawancara peneliti akan menggunakan daftar pertanyaan yang di buat dalam kaitan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengelolaan dan transparansi Dana Desa Menurut Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat di deskripsikan sebagai berikut:

Hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Tahap perencanaan pemerintah desa harus melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dengan peraturan desa dan rencana kerja pemerintah desa.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa menyatakan bahwa:

"iya, setiap tahun selalu disampaikan melalui rapat yang dihadiri oleh BPD dan masyarakat, karena kalau tidak dibuat rapat kami aparat desa akan mendapat teguran dari Pemerintah Kabupaten"
(Wawancara SH Pukul 10.00 Tanggal 12 Mei 2021)

2. Pelaksanaan

Setelah APBDesa direncanakan dan telah ditetapkan oleh pemerintah tahapan berikut adalah pelaksanaan, pada tahapan ini pemerintah harus melibatkan seluruh masyarakat desa. Hasil wawancara peneliti dengan Aparat Desa menyatakan bahwa:

"kami selalu mengatur proses pengelolaan dana desa agar terarah sesuai yang di inginkan dengan melihat mana kegiatan yang prioritas akan tetapi terkadang ada perubahan peraturan bupati sehingga keinginan masyarakat yang sudah dibahas dirapat tidak terealisasi dan dirubah pada perubahan anggaran" (Wawancara NS Pukul 10.00 Tanggal 17 Mei)

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan dengan melaksanakan seluruh peraturan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara peneliti dengan Aparat Desa menyatakan bahwa

"Mekanisme pertanggungjawaban dana desa di Desa Sidoharjo yaitu kepala desa di setiap akhir tahun harus melaporkan realisasi dana desa sehingga wajib bagi desa menyelesaikan pertanggungjawabannya" (Wawancara ST Pukul 10.15 Tanggal 19 Mei)

4. Pelaporan

Laporan realisasi dilaksanakan oleh kepala desa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris Desa menyatakan bahwa

"menggunakan sistem yang ada, karena Setiap penggunaan anggaran yang pemerintah desa lakukan pasti akan dibuat laporan pertanggungjawaban, karena jika pemerintah desa tidak melakukannya maka akan mendapatkan teguran dari pemerintah pusat" (Wawancara ST Pukul 10.15 Tanggal 19 Mei)

5. Pertanggungjawaban

Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan Dana Desa. Hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris Bumdes menyatakan bahwa.

"Sejauh ini belum ada, karena dalam pelaporan dana desa mulai masuk tahun 2015 sampai saat ini tidak terdapat kendala, dan setiap tim audit datang memeriksa alhamdulillah kami tidak pernah dapat temuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan kami menyampaikannya pada akhir tahun, paling lambat bulan maret" (Wawancara SS Pukul 12.50 Tanggal 17 Mei)

6. Transparansi

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi segala sesuatu tentang keuangan Desa dan masyarakat berhak mengetahuinya.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris LPM Desa menyatakan bahwa

"menurut kami prinsip transparansi sudah dilakukan oleh desa dengan mencantumkan pengelolaan dana desa dipapan informasi seperti baliho APBDES dan 2019 serta 2020 tapi masyarakat yang tidak bisa memahami, bahwa itu adalah salah satu prinsip transparansi pemerintah desa kepada masyarakat." (Wawancara S Pukul 12.50 Tanggal 17 Mei)

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Indikator Transparansi menurut Krina (2015:17). Sebagai acuan guna untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa di Desa Siduharjo

Kecamatan Tolangohula Kabupaten
Gorontalo.

1. Perencanaan

Sebagaimana hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohulo, Peneliti menemui bahwa Pemerintah telah melakukan perencanaan rencana kerja pemerintahan dalam hal keuangan dengan melibatkan masyarakat. Namun perlu adanya keterlibatan masyarakat secara rutin sebagai bentuk pengawasan terhadap Pemerintah Desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran adalah hal yang sangat penting baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Karena keterlibatan mereka akan berpengaruh terhadap kualitas perencanaan pengelolaan dana Desa dan memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah desa harus pro-aktif melibatkan masyarakat dengan menyediakan wadah partisipasi dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program desa. Memberikan kesadaran bagi masyarakat baik kelompok pemuda, kaum perempuan, dan masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa sangat diperlukan dan sekaligus kewajiban bagi pemerintah untuk melibatkan elemen masyarakat Desa. Transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran harus diutamakan untuk menjamin anggaran tersebut tepat sasaran. Hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Meysi Egi Yalti (2020), yang menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan.

2. Pelaksanaan

Sebagaimana hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula, Peneliti menemui bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Sudah di implementasikan di Desa akan tetapi sering terjadi perubahan anggaran terutama pada pelaksanaan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa.

Kemudian berdasarkan keseluruhan hasil wawancara yang peneliti dapatkan serta hasil analisis peneliti pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Sidoharjo sudah mengupayakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan Dana Desa sebagaimana di atur oleh Permedagri No. 20 Tahun 2018 Namun belum sepenuhnya terrealisasikan karena masih adanya masyarakat yang menuntut penggunaan Dana Desa tersebut dan terkadang realisasi belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

3. Penatausahaan

Sebagaimana hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Sidoharjo

Kecamatan Tolangohula, Peneliti menemui kegiatan Kaur keuangan meliputi penerimaan, pembayaran hal ini menunjukkan bahwa Desa Sidoharjo telah melaksanakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa.

Kemudian berdasarkan keseluruhan hasil wawancara yang peneliti dapatkan serta hasil analisis peneliti dari segi penatausahaan Desa sidoharjo sudah sesuai dengan Permedagri No. 20 Tahun 2018 karena kegiatan menatausahakan keuangan desa yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, melaksanakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah dilakukan oleh tenaga yang ditunjuk langsung yakni kaur keuangan.

4. Pelaporan

Sebagaimana hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula, Peneliti menemui kegiatan Kaur keuangan meliputi penerimaan, pembayaran hal ini menunjukkan bahwa Desa Sidoharjo telah melaksanakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa.

Kemudian berdasarkan keseluruhan hasil wawancara yang peneliti dapatkan

serta hasil analisis peneliti dari segi penatausahaan Desa sidoharjo sudah sesuai dengan Permedagri No. 20 Tahun 2018 karena kegiatan menatausahakan keuangan desa yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/ membayar, melaksanakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah dilakukan oleh tenaga yang ditunjuk langsung yakni kaur keuangan.

5. Pertanggungjawaban

Sebagaimana hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula pertanggungjawabannya sudah berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hal ini ditandai dengan adanya pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat atas pengelolaan Dana Desa.

Kemudian berdasarkan keseluruhan hasil wawancara yang peneliti dapatkan serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Sidorhajo sudah mengacu pada Permedagri No. 20 Tahun 2018.

6. Transparansi

Sebagaimana transparansi menurut Krina (2012:133) ia menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Sebagaimana yang peneliti temui pada observasi awal peneliti menemukan bahwa transparansi di Desa Sidoharjo memang sudah terimplementasikan sejak lama. Hal ini dilihat dari kegiatan kegiatan Desa yang selalu melibatkan masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Sidoharjo sudah di implementasikan oleh Pemerintah Desa tetapi masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan menyala artikan penyampain proses pengelolaan Dana Desa maka perlu adanya evaluasi dari pemerintah demi tercapainya transparansi penggunaan Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang Efektivitas Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa menggunakan teori Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan teori menurut Krina (2015:17), maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa: dimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa sudah sesuai dengan ketentuan pengelolaan Dana Desa yang diatur dalam

permendagri No. 20 Tahun 2018, namun dari segi perencanaan Pemerintah Desa Sidoharjo sudah melibatkan masyarakat tetapi partisipasi masyarakat belum optimal dalam proses musyawarah perencanaan Dana Desa sebagai bentuk pengawasan terhadap Pemerintah Desa, dari segi pelaksanaan sering terjadi perubahan anggaran dan dari segi transparansi pengelolaan Dana Desa sudah di implementasikan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo tetapi masih perlu adanya evaluasi pemerintah terhadap masyarakat mengenai penyampaian Pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat dengan baik dan jelas agar terciptanya laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel.

Referensi

- Aprisiami, (2012) penerapan otonomi desa dalam menguatkan akuntabilitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat:Yogyakarta
- Arif, Furchan. (2015). Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Surabaya: Usaha Nasional.
- Ardianto, Elvinaro. (2014). Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Bandung: Simbosa Rekatama Media.
- Beni Pekei. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1.Jakarta Pusat : Taushia.
- Cholisin,Naiswan. (2012). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Yogyakarta:Penerbit Ombak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pasal (77) dan (78)

- Arista Widiyanti (2017) Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
- Meisy Egi Yalti. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Banda Aceh
- Yulianti,wiken (2019) Analisis Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Sungingi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru: Riau
- Peraturan Kementrian Keuangan (2021) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 6-7 Januari
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri Desa,Pembangunan Daerah Tlnggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 22 (2015)